



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HASAN JAYA; ----- |
| Tempat lahir | : Mataram; ----- |
| Umur / tanggal lahir | : 54 tahun / 9 Juli 1960; ----- |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia; ----- |
| Tempat tinggal | : Dusun Karang Bongkot, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat; ----- |
| Agama | : Islam; ----- |
| Pekerjaan | : Swasta; ----- |
| 2. Nama lengkap | : H. TOHRI; ----- |
| Tempat lahir | : Parampuan - Lombok Barat; ----- |
| Umur / tanggal lahir | : 68 tahun / 11 Juni 1945; ----- |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia; ----- |
| Tempat tinggal | : Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat; ----- |
| Agama | : Islam; ----- |
| Pekerjaan | : Swasta; ----- |

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014; -----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : untuk Terdakwa I didampingi oleh I Ketut Sumertha, S.H. dan Denny Nur'indra, S.H, berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 22 April 2014, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Sumarta Singanulung, S.H., Lalu Hapiz, S.H., dan Saipul Masri, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 146/Pid.B/2014/PN Mtr. tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2014/PN Mtr. tanggal 14 April 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HASAN JAYA dan terdakwa II H.TOHRI bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASAN JAYA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II H.TOHRI selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tgl 8-10 Oktober 2012, senilai : Rp.150.000.000,- di tandatangani oleh HASAN JAYA ; -----
 - Kwitansi tgl 12 Oktober 2012, senilai : Rp.10.000.000,- yang ditandatangani oleh HASAN JAYA ; -----
 - Kwitansi tgl 17 Oktober 2012, senilai : Rp.15.000.000,- yang ditandatangani oleh HASAN JAYA ; -----
 - Kwitansi tgl 23 Oktober 2012, senilai : Rp.25.000.000,- yang ditandatangani oleh HASAN JAYA dan H.TOHRI ; -----
 - Kwitansi tgl 5 Nopember 2012, senilai : Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh HASAN JAYA dan H.TOHRI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tgl, 20 Nopember 2012, senilai : Rp.10.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN JAYA dan H.TOHRI ; -----
- 1 Lembar surat pernyataan dari Inaq Mar kpd Made Oka, 4 Maret 2008 ; -----
- 4 lembar Berita Acara eksekusi Nomor : 3/PDT.G/2003/PN Mataram tanggal 31 Agustus 2005 yang dimenangkan oleh I GEDE SUJANA ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM.

- Sertifikat hak milik No. 129 atas nama I GEDE SUJANA (foto copy-legalisir) ; ---
- Surat kuasa menjual dari I GEDE SUJANA kepada AGUS MULYADI, 24 Maret 2008 (foto copy-legalisir) ; -----

Dikembalikan kepada : FIKRI SAID, SH.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I berpendapat bahwa Terdakwa I terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun mengingat Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Penasehat Hukum Terdakwa I mohon agar Terdakwa I dijatuhi pidana yang seringan-ringannya; -----
- Bahwa berbeda halnya dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa II yang berpendapat bahwa Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, karena pada saat Terdakwa II menawarkan tanah kepada H Nur Asikin Amin, Terdakwa membawa sertifikat tanah dan bukti pendukung lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang tidak bisa baca tulis dan Terdakwa II hanya ikut menanda tangani kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp110.000.000,00 namun Terdakwa II hanya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 ; -----
- Bahwa setelah mengetahui tanah itu bermasalah, Terdakwa II bermaksud mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa I mau menerimanya dengan alasan ada tanah milik istri Terdakwa I yang akan dipakai sebagai penggantinya; -----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa II mohon agar Terdakwa II dibebaskan dari segala tuntutan hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan karenanya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya; -----

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I HASAN JAYA bersama-sama dengan terdakwa II H. TOHRI pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Koperasi Propinsi NTB Jalan Airlangga Kota dan dirumah saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM di jalan Majapahit No. 9 Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada bulan September 2012, saksi MASNUN Alias SENUN menawarkan kepada saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM sebidang tanah seluas \pm 60 are (6000 M^2) yang terletak di Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (sekarang termasuk Wilayah Kota Mataram) dan setelah melihat lokasi tanah tersebut, saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM minta dipertemukan dengan pemiliknya. Beberapa hari kemudian para terdakwa bersama dengan saksi MASNUN Alias SENUN mendatangi rumah saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM untuk menerangkan asal usul tanah dan memperlihatkan surat kuasa menjual, Berita Acara eksekusi Nomor : 3/PDT.G/2003/PN Mataram tanggal 31 Agustus 2005 yang dimenangkan oleh I GEDE SUJANA, surat pernyataan Inaq Mar dan sertifikat hak milik No. 129 atas nama I GEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJANA sambil para terdakwa mengatakan “pak, tanah ini sudah tidak bersengketa dan tanah ini nama sertifikat masih I GEDE SUJANA” setelah melihat sertifikat asli dan mendengar penjelasan dari para terdakwa membuat saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM yakin untuk membeli tanah tersebut sehingga terjadi tawar menawar antara para terdakwa dengan saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM, akhirnya kesepakatan harganya adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-are sehingga total harganya adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Para terdakwa juga bersedia mengurus surat-suratnya ke Notaris sehingga saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM semakin yakin terhadap para terdakwa lalu memberikan uang muka pembayaran secara bertahap yang disertai kwitansi yaitu :

- Tanggal 8 Oktober 2012, senilai : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HASAN JAYA ; -----
- Tanggal 12 Oktober 2012, senilai : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HASAN JAYA ; -----
- Tanggal 17 Oktober 2012, senilai : Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh HASAN JAYA ; -----
- Tanggal 23 Oktober 2012, senilai : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh HASAN JAYA dan H.TOHRI ; -----
- Tanggal 5 Nopember 2012, senilai : Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh HASAN JAYA dan H.TOHRI ; -----
- Tanggal 20 Nopember 2012, senilai : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HASAN JAYA dan H.TOHRI ; -----

Penyerahan uang tersebut bertempat di Kantor Dinas Koperasi Propinsi NTB, Jalan Airlangga Kota Mataram, selanjutnya penyerahan uang tanpa kwitansi sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM, yang disaksikan oleh saksi MASNUN Alias SENUN dan saksi PAHRUDIN, sehingga totalnya adalah Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah); -----

Namun setelah beberapa lama penyerahan uang tersebut, saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM. mendapat informasi bahwa tanah tersebut bukan milik dari para terdakwa dan dari putusan Mahkamah Agung hak atas tanah tersebut dimenangkan oleh INAQ MAR namun para terdakwa tetap ngotot atau bersikeras bahwa tanah tersebut adalah milik I GEDE SUJANA dan tidak dalam sengketa, yang akhirnya saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM meminta uangnya kembali namun para tidak memberikannya dan terdakwa I mengatakan “Pak Haji, diganti tanah lain aja, kalau mau tanah milik saya yang berada di belakang Eks Kantor Bupati Lobar, tanah ini belum bersertifikat, nanti sertifikat tanah akan kami urus atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak" mendengar keterangan terdakwa I tersebut, saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM menyetujuinya dan melihat lokasinya di jalan Sriwijaya Kota Mataram tepatnya di belakang Eks Kantor Bupati Lobar, seluas 10 are (1000 M²). Beberapa hari kemudian para terdakwa mendesak saksi Drs.H.NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA.MM untuk melunasi sisanya dan mengatakan "**Pak haji...proses pengurusan persyaratan surat-surat tanah sudah selesai di Notaris, kami tunggu sekarang di kantor Notaris**"

ecc9e1ef0c4b71aff84746f0ee9700c36a171a94b6de5e781995a5193e9926bf2dbf68ff00879f01fc3
dad96bf08fc6de20f13cf9005ac9a789a0ce7040b8cc65bdb11918c7cc6be88f861ff04f0f8d5fb426
a765ae7c6cf166a7a4e90a437d9f52bc6bcd4a44e090a8c4ac591919739040f908af0af82fb2e7c3
4f801a74307843c33696d7a8a43ead72826be972006dd330dc01c0f9570bed401f8a9e04f823fb41
787ca6b5e13f0978e347da85d6fac2dae6d805ea4ef18e38fd2bbe869f16ff6bbf1ae9b2de783b5df1
cf896cade736d2dc5beebd5494004a33306c1c1079f5afdacf18f87cf8afc23ade86b72f62752b19ec
c5cc632d0f99194de07192339fc2bf15751fd957f69ff00d9cbc497d178574bf14449248546a1e0f9e
5923b9404ed63e49c8047387008cf205007eb6fecbd6be39b5f819e17ff008591777379e3396179b
50376aa248d9a462a84281caa9507af39e718af55afc3cbff00177ed936d6a63b9b9f8a51c791f308a
ec367fde03349a678dff6c7fb3916b75f146540c771920bb9083e996527a62803f7128afc47ff0084d
bf6d0ff009ebf13bff012e7ff0089a82f7c6ffb648b67fb4dcfc508e1e37325bdd211cf1caa8239a00fd
0aff82977c0b83e2f7ecf17dacc7711daeafe11dfaadb3ccfb5248b6e268b2480095008ea4b2051f7a
bbefd860dd8fd923e1a1be0c271a58c071cecdefb3ff1ddb5f9b1e0bf815fb547ed55e22b3f0df8d6ff
00c61a7f85bcc59af6f3c4ef3c567122f52b1b604b2760aa09c9192a32c3f617c21e14b0f03f84b47f
0e6968d1e9ba559c5656eae72de5c6815727b9c0e4f73401f317ec17e31b2f8a7abfc6bf1df9e67d5
356f16c96e55c8df159431aadaa103b056700f7c57d6d5f891ab78ebe25ff00c13a3f69cf16da68f11
5d32f677956c352466b3d52c99d8c12fca464ae480ea41560ea7f894fd156dff059fb01669f68f85b7
06ec01b847aca8427d4661c8fd6803f4b6be2af805a4da8ff00828d7c78d4345f2a4d246936897125
b1cc7f6a75819c1238ddb965c8eb9cd7cb3f1bfe0a95f173e315c8f0bfc39f0ec1e179b5375b5b7fb
02b5eea4ecff002ec8dc80a1893c1540c0e3041afbafb61bfd9ab52fd9ebe1b5e5c78a6e8df78efc4d3
aea1adcc6633147e764464c9decbbdb730e0b33609003100f06ff0082be78764baf0fcf2cd713a596
b335a37ae655461ffa24fe75fa0966cef69034836c8514b0f438e6be6cfdb2fe1a6a1f1875ef835e158
346b9d474893c5497faadd468de4db5b411333891c7085c121738c9181c902be9803000f4a00f01f
dbb3e29c9f093f661f196a76d2ac3a8dfc0349b42c48fde4e7631047461199181f5515e43a1ff00c13
33e0d78fce06787ed8d9dc59789aeb4b82e24f13595e3c924970f10669363318d90b1ced0071c061
d6bd87f6e0f811a8fed0dfb3deb7e19d11524d7e0963d434e8a59046b2cd193fb2c7805919d4670
3711920648fc5fd3b52f8d1e1fb97f00585d78cec271335b1f0f5b49728c24270c9e48ee4e7231401
f67ffc13fc05a9fc08fdb7fe207c3d92fe1d5a1b4d2e7825bab570d1baacb13c6e40242b60805724a
962a7915f607fc143b493ac7ec79f12344df2436f05c2fb6cb98989ff00be4357987fc1363f640d67
e04681aa78dfc6b01b5f18788605862b0918996c6d321cacbce3cc7608c5719508a0904b28faf3e20
783ad7e21781bc41e18bd62969ac58cd632481725048857701ea3391ee2803c1ffe09c5e23b7f10f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c7de05586e52e27b04b8b2b8556c989d6790853e876321fa115f47ea3a8dae9161737d7d730d9d9
5b46d34f7170e1238914659998f00000924f000afc52d63e037ed49fb2af88353d0fc249e2c4d2657
328bcf0a3cd3595caf2039d8301b1d980614cf0afc2bfdaaff00699bd83c21ac5df8d4e8534a1eea7f
14cf75158c2011f33f99f7b0390a013d703ad007e9e7ecdbfb5c681fb4bf8d3e2269be1c87fe24fe1b
b8b78ec6fdf28f7f1bab0793cb3caa878db19e4ab2e429c8af7dafc50f887fb2c7c7af927e2adf2fc3
78fc4b79657106cb7d7bc330c9fe9301da592458cb152180ca37750464609cc3bc6ffb6379045a5
d7c519630c72d24176e73f56527d2803f70a8afc47ff84dbf6d0ff9ebf13bff00012e7ff89a3fe136fdb
43fe7afc4dff04b9ff00e26803f41bfe0a09fb2c78d3f69cf056936fe14f10dbda9d19e4b9fec2bb0d1
c57d21520379a0e0381f2a865c7cedf32f39fc50f1068577e18d72fb49bf11aded94cd04c2195654d
ca7076ba12ac3dc120d7d49a5f877f6c0f8d5b7c2f23fc43bbd3efb74730d5a6b8b7b52a73b84b248
5576f5e18fb015f69fc1dff0082597837c3df07b5dd13c6f245ac78cf5b84a36b16db9974d20864fb3
eec64ee00b12016195e99244c1a3e78ff008261feca3e29d73e2268bf176f2e20d3bc2ba5b4a2dc45
70af3decc5190a6d52762ae416df8272a0039257f5bdd6342cec1540c924e0015f8a9e2af977f69
af937c537507825bc4773a5dc7eef53f07cb34b0dc28008f35106548ce30ea3241db918354bc2d
e1efdae3e37f8853c1771a9fc4086d755630de4bae4f79058c511fbed33370100eaa0127800124020
1d9fedfbfb6345f11be35e8965e1b86fc43e08f05de86f2aed4cb61aa5e2b664dfb580922c285183c
8dc41c357cefef28f8cebe37f8dfe1af1c785bc27a7f81f5b82e2d64365a12916ad751c836cb1458f93
20202a33c8273cd7ecb7c2dfd8d7e1d7817e05d87c37d5b41b1f12da7965f50b9bd84192e6e5c7ef
25561864f45da41550392724f23f0f3fe09bdf083e19fc56b4f1ce916da9b5c58cc2e6cb4cb9ba125a
db4c0e55d72bbced2015cb1c11ce7a5007d4092ca517309ce3fbc28a9e8a0028a28a0028a28a0028
a28a0028a28a0028a28a0028a28a0029314b45001451450014514500145145001498a5a2800a28a
2801314b4514005145140057c77e21bb8be377fc143b49f0cddb79ba27c33d14eb02d5d72925fc6
3d8f9f5124447bc7f5afb12bf3b7e0978d63f097fc153be29e8fad4a629bc436925ad8ee180ccab0c
c809ed98e37c7a9c7a8a067e895145140828a2bce3e247ed0de00f841afe9fa478cf5f4f0e4fa84466
b49ef60956da60090ca260a630cbc654b020329ee2803d1eb89f8cbf16b42f821f0e759f187886e12
1b2d3e167488b857b997076429eacc4607a724f00d78e7c4cff828b7c0df873a6dc4b1f8ba2f136a2
8b98f4fd0a36b8790fa799811afbe5b3ec7a57c456be23f88ff00f0548f8d9a7584f6527877e18e893
2cf776d04c4c56d0923716723f7b3b80557e5e33d02863401f5a7fc1367c2bab5f7c3ef177c55f112
95d77e21eb32ea4d9e018119c2103f872ed2f1e816bec2af9f3e2afc64d77f667b7d2f4bd1fe0feb3e
27f0169f6114316a7e1fb8495ed846a46c7b7c6e0aaaabf393839af923e2affc156fc5de26b49742f8
63f0eaff0047d62e5fc88b50d4d7ed33a31e3096e136efcf4dc587fb34867d19fb777ed8fa77ecf3e07
bad0341bb8aeb226af0986cad633b9ac95c63ed0e074233f203d4e0e08041ea3f60bf84375f073f6
6bf0ed8ea51b45ad6ae5f5ad411f20acb3e0a82080411188c11d8835f297ec69f01f8a3c5fe375f8a
ff001e21b9b9b8f3bed569a1eaeed25cddcf44d761b9080f489b9623e60146d7fd3203029885a28a
2800a42052d1401f0778aff00e0a6307867f6b3baf87d07872e359f08413268cd358a16bd37fe6157
9238f1f3a64f97b07276ee079db5f77412f9f0c726d64dea1b6b8c30cf623d6bcc75af9abe1f6bbf1
9745f8a371a0c0be2ed2d1d52e6245549d8aed59255c7cee83215ba8c8ebb536fa8d001451450026
2968a2800af913f6c7f109f0b7ed21fb2fea0ea0db37882f2ce42c7014ccb0440fe1b89fc2bebbaf897

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fe0ab1a73da7c1cf06f8aef2b77a0789ada55940cf96acaf963ff02441f8d007d67f133e1f695f15bc
01af78475b8ccba5eaf68f6b36002c991f2bae72372b61867ba8af81ff00625ff827bf8dfe087ed217b
e2df169b64d0f418e78b49b9b79d1cea2f22b461f60c94511b313bb07715001e71fa21a0ead6faf8
7a7ea768e24b5bdb78ee227072191d4329fc88abf400526052d1400526052d14005145140051451
40051451400514514005145140098a5a28a0028a2b96f891f12b40f84fe1893c41e25b99ad3498a4
48a49e1b596e0a163804ac6ac401dce3f520100ea6909c57865f7edc7f0234ed186a72fc4cd14db11
90913bc937d3ca552f9ff80d7c55fb49ff00c14af5af8c371ff0aebe076997b08d58fd89b5a914c77b3
b390a16dd41ffd03c8def361ba2632403d4b50f16c5fb5b7fc140fc39a5e8eff006df03fc2b8e5be9
eee36fddcb7e180dc8d8e409044a06482227604835f7bd7cefbff00ecbd1fec7f0956c750092f8b
b587177acdc238701c67cb85481caa293ebf333904822be8aa0028a28a0028a28a002be76fdb7ff00
6a05fd97fe130d52c235b8f146a937d974a81d7281861a491f3d5546011d4975f723e89ae6be21fc3
7f0d7c57f0b5df873c59a3db6b7a3dc8f9edae5738382032b0e51864e1948233c1a00f37fd923f696
b7fda93e16af8a63d0eeb42bab79cd9ddc137cd0b4ca0126193f8970c3a80413839e09f6dae2fc1fe0
ff000f7c06f8596ba1e8361711e83e1fb2631db5b44d3dc4a14166215466491db71c0192cdc0e715
e6da5feddf02f52d30de49f1034fd35914196d3514920b888f7531b2e491fce7db3401efb5f12fedf
9f109fe227887c19fb3b78627fb46bde2ad46da6d61621e60b5b257de048067192be61e842c60f46
ae53f688ff82b0785343d32eb47f84d6d378975f994c716af73034767012387446c3c8c33d0aa8c81
f78715d37fc13f7f65df13786354d5f3e337c510f3f8f7c49196b7b7bc41e7d945236e76718f9247c28
da305172a40c90003ed5d2f4db6d1f4db4b0b48560b4b589208624185445002a8f6000156a8a280
1319a5a28a0028a28a00f9dbf6f8bd73f07bf671d6eeb4f95adf56d6e58f43b39d07313ce183b820
82088d64208e8db6bd93e1af81f4ff86be01d03c2fa54623b1d2aca2b58f800b6d500b1c7763963ee
4d7ca9ff00055ff096a7e21fd9922d4b4e8da54d1358b7bcba0a71b222af1eff00c1dd07e3ed5e57fb
30ff00c1573c3b6fe13d27c39f15ad2fed355b2896dcff886d57ed115c8190af2a0c3a36d0a091bf71c
9e33c007e92515f377fc3c5ff678f2f7ff00c2c6b7c7a7f675e67f2f26bc7fe2dff15bfe1cf8774fbbb5
f01695a978bb5b20a5b4d710fd9acb71070c493e630071f2855cf4dc3ad006fc48f0e9f15ff150be
1c496d1f9d1e89e1292f2f9939f286fb9542de9969231f8d7da78af92bf61bf867e32d4afbc4df1c3e
2746b078dfc6cb1adb92c463fb169ea17cb4dbfc3bb6a10a790114924b1c7d6d400552d6346b0f1
0e9773a6ea9656fa969f728629ed2ee25962950f556560411ec6aed14019fa0681a7785b44b1d234
8b38b4fd32c61582dad605da9146a30aa07b015a1451400981e94b4514005145140051451400514
5140056478bbc53a6f81fc31aa7883589fecba5e9b6ef757336d2db2351927039278e82b5e908046
08c8a00f877f63ff00f828a5c7ed05f14756f05eade16b98a4b8b99ee749bdd3d3cc486d037ca973d
36955ff00969d09c0da0f5fb8ebcd7e1a7ece5f0f7e1078bcc47e24f08f86ed745d4f5edbf6b6b75c2
28049db12f48d49392ab80481c7031e9540057e74ff00c15abc3de22ff0ddfc31f89de1f334326837
5242d79160fd966dc92c2d8f728fedf2d7e8b551d7342d3bc4da4dd697abd85b6a9a6dd4662b83b
c89658a543d559581047b1a00f827e097fc15c7c13ace856b69f1274cbed035c45092dee9f079f693
7fb7b41de87db0c3a9c8e95e85e23ff0082aafc08d0e1df697fad6b927fcf3b0d3581fce5283f5ae5fc
7bff000489f859e23d466bbf0f6b7adff8596572ff64474ba86307a2a0701801eec4fb1e0aff008244
7c29d06f61b8d7b5ad77c4a2260c6dda44b68a4c766d83760fb303ef401e37af7ed41f16ff00e0a17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e256f86df0df486f05782aed59355bf66324860c7cde7cc06114e31b1064eeda4b038af18f03f83fc
35f007e13d8e876522e9de1af0dd8333dc5c301b63405e596420019277bb1000c93802b43e1ff00c
33f0afc2af0fc3a2784741b2d034c894010d9c4177e06033b7de76c7f13124f7354fe2efc2ed2fe33fc
3dd5fc1fad5d5f5a699a9c7e54d269d3f932e3a8f9b078ce0e0820e3041191401f3ff8294fc25bef8
39e23f1969fa906d63494654f0d5d388aeee262c562080fde462012cb9dabc919c03e89fb2efed65e
10fdaf9c333df787e3bbb1d56c1631a96997711cdbbb0e36c806d7524360839e39515e05f06bfe09
49e05f07d978cacbc73743c631ea6cb069575107b69aca10a0993824097793fde1841d77b28fa5ff0
066ff00d9d7c39fb337c3e3e15f0ebcd751c9772ddcf7b738f3a7763f2eec71f2a045e303e52703268
03d531462968a004c52d14500158de22f07689e2d6d39b59d2ed7526d36ee3fbfb36b88c31b7b88c
e52543fc2c0f715b3450014554d5b528f47d2af2fe58e69a2b585e778eda2696560aa49088a096638
e140c93c0af178bf6e0f8172e932ea07e24e8f0c31e77c53978a71ede4b28933edb73401ee75f04fed
93e338bf68bfda17e1c7ecf7e1e9fed96706a69aa89a6b6718856304f97bbb324624247aba0e08e3
98fda63fe0ab3a50b2b9f0d7c19b59f57d52e94c23c45730b471c44e06608980776e4e0b05c11d1a
bd2ffe09f3fb305ffc13f09eb1f133e2233c7e38f1144d7170f7b36f92d2d0e243e693d246237b649c
00a0e0ee0003ed08d16245450155400001c014a4e2be74d4ff00e0a17f0034ab579a5f8810332827
c88ec6e8ca4fa6df2b20fd715f16fed2dff0529f1fc732be01f82da2eaba7c1a8c8207bff002f76a379
9c011c31a67ca04f704b1e3eef20807b0ea9e3db6fdaaffe0a29e12d134574d47c1ff0c21b8be9eea3
20a49783019d4e39025f2107507cb660706befcc015f2efec0ff00b2649fb32fc359e7d79227f1c6bc
527d4da37f305b280765b86e84aee258af058f0485535f51d001451450014514500145145001498a
5a2800a28a2800a28a2800a28a2800af91ff006c5d653c53f1cff67ff86333c4da6ea9af9d6750b795
432cc96a034684770c7cc041f6afae2bf383fe0a9977aefc2ef8adff073e2b68c85db479648d4b2b189
658e449555c8c70e198633c806803f4780c0a5af9ebe06fedd5f097e37e8505cc1e26b2f0deb05545
c68fae5ca5b4d1b9e308cc42c8320e0a9ce3190b9c57aea3f14bc19a3db89eff00c5ba1d94079125
c6a30c6a7f12d401f921fb4d78ff00c59f093f6fed63c6fe2af062f88e1d36f164d334fd414b5b4d681
02c122300402061811f75c723208afabbe0d7fc1587c01e3cf115b689e2ff000fdef80e6b9711457b
2cc2ead439071e630556404e067690091920648f67f88fb737c06f0247245aaf8ef4ad566da585ae
940df97f6cc41941fa915f077ed03fb50685fb655fdafc32f84ff00082da5d5b54ba8d60d7ef2d225bf
8d548773188c7ee8614ee767236eec81d4007eb9290ca0a9041190452d627823c3f2784fc19a0e87
2dd35f4ba6d84166f74e30d318e3542e47a9c67f1adba0028a28a0028a28a00f1ffdafa29e6fd987e2
62db12261a1dc0c7a05c9fd01ab3fb28788ed7c57fb357c34d42d183c3fd83696e48fefc51889c7f
df48d5d67c58f0d3f8cbe1778c3408ce25d5348bbb2438ce1a485901fccd7cdf00f04b7f14c9af7ec
ab65a64db449a06ab77a6e07a6e1303ff009188fc290cf06da7ff0993e27f883fb490f107829ec60f
08f88ee7ed9aa4b732ec3a64c799be4cee915ce597674662a42a80c7f49741d1adfc3ba1e9fa55a29
5b4b1b78eda10c724222855cfe0055fa29884c0f4a5a28a0028a28a0029302968a0028a28a0028a2
8a004c5181e94b4500262b85f8dff0016b48f81bf0bb5ff001a6b4d9b5d32dcba401b6b5c4c788e25
383cb310338381924601aeee9eada458ebda7dc586a5676fa858dc46d14d6d7512c91c88ca55959
58104104820f5048a00fccbbff82abf897c59fb3ef889b4ff0007dce9fe3eb41142759b08da5d3add
5db1e7b03931be061518952dce70361faabf612fd43c5ff00b4afc2c9b5cf15f86e2d2e4b39fec89a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adb3ed87506500b32c472ca4657273b492718c103d37e187ecebf0f3e0ee8faf93e15f0cda69fa6eb
b334d7f6cebe72cc0aedf2cefce6300b610f037371c9aecfc2be13d1bc0fa059e87a069b6da469166a
520b3b48c2471824b1c01ea4924f72493c9a00e53e30fc03f01fc79d163d33c6fe1eb6d663849304e
c0a4f013d7cb9170cbdb233838190715f3349ff00048cf824f726517fe2b44273e4aea10ed1edcc39
c7e35f6d51401e47f067f651f85df01184fe0ff0adad9ea5b76b6a7704cf7478c1c48e495c8ea1700e
4f1cd7ae5145001451450014dd8b9ced19f5c53a8a0028a28a00292968a0029302968a004c518a5a
2800a28a2800a4c52d140051451400514514005145140051451400514514005145140051451400
51451400514514005145140051451400514514005145140051451400514514005145140057e5b7
fc1537e05788bc1df12748f8e5e134b88606fb3c57f7b66e7cdb2bc8bfd4cc71caa95540187019392
0b2e7f526a8eb9a258789747bdd2b54b48afb4ebc85a0b8b699772491b0c3291e841a00fcfcfd9abf
e0ac9e1cd6f4ab0d13e2e5b4ba26b5146b13f8ace2f32d2e88073249128dd131017210329624808
30a3edb0f07fc6df87ff10238dbc39e34d0b596914308acf5089e403dd036e1f88af84be3a7fc1216c7
59d4aeb54f861e238b47595b70d1b575668539e424cb96c7a02a7a7279c8f99754ff008262fed07a
2decab69e1db3bd8a36c2dd5aeaf6e8ac3d4077561f88a00fdb12a11f7d7f3ae67c7fa1783fc5da0c
da578c6d749d474a9396b7d5046d1e70791bba1193c8e457e3bf86bfe09b9fb46eb1ab416571a743
a25b487125edd6b5134510f52b13bb9fc14d7d6ff083fe092fe16d085bde7c46f15ea5e2eba1b5df4e
b276b5b4cff12b364bbaf8286803d0ac3fe09d3fb3678b2f06b1a3e8ab79649218da1d3b58926b6
2c3ef2921d8e7d46ec8afa63c09f0ffc3bf0cbc356be1ff0b68f6ba268f6a3115adaa6d5f724f56638e
58924f7350fc3cf86be17f84fe1b8b40f08e896ba0e911b1716d68980ce4005d89e5988032cc49381
cd74d4005462de2121904481c8c160a33f9d494500145145001451450014514500145145001451
45001451450015f3cf1403c2f278b3f645f8876d0c4259edace3be407b0865491cff00df0ad5f435
725f173c2f3f8dfe1578cbc3d6a824bad5b46bcb18549032f242e8bc9e072c393401c6fec85e245f1
5fecce7f0d75056dc0e896f6f9f7897ca3ff00a057afdf7997ecdf5f0aa7f825f02fc1de0abb9d6e6f34ab2
db71227ddf35d9a49029ee033b007b800e074af4da0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a002992c49346d1c8aae8c0865619047a114fa2803e79f895fb037c
10f8a5a94ba8ea7e0c86c3509bfd65c6912bda6ef7288426793cedc9ef5d4fc18fd943e177c029deeb
c1de1782c75274f2df19dda7b861e81dc9db9ee1719ef5ebb450014514500145145001451450014
51450015e3bf183f645f851f1d2ecdf78b7c236b75aa1523fb46d99adef0f00659908de70001bc1c0
1c57b151401f3ffcc25fd84be0c7c1ad5e0d5f45f094779abc0dba0bed5a56ba784ee0ca5037caaca40
c305dc31d6be80a28a0028a28a0028a28a0028a28a00afa869f6bab585cd8dedbc57767731b4335b
ce81e39518619594f04104820f5cd7c1bf167fe090fe03f176b536a3e0df12def832394976d3a483e
d9029f4425d5947d4b753cf61f7d51401f98ba7ff00c11899a5ff004ef89c122cf5b7d277123f19457
d33f027fe09d7f093e06ead6facc56171e29d7602af15e6b852548241fc71c614283dc13b88201041
02bea1a280100c52d1450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500
1451450014514500145145001451450014514500145145001451450015e23f15bf62ff0
0839f196f1efbc45e0bb2fed37ddbaff4f2d6933127259cc64076f7704d7b751401e09f07ff0061cf8
39f04b548b55d03c2915ceb30b6e8751d5643752c2776e529bbe54652061800dc75af7ac52d1401
e71e3bfd9c7e187c4c7964f13781343d56e25fb73259a2cedce7991406fd7b9f5a5f86bfb3afc34f8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama